



# RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU



TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI  
UTARA

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat-Nya semata, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dan Penetapan Nomenklatur Perencanaan Program dan Kegiatan telah mengadopsi Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 merupakan dokumen rencana pembangunan OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dapat mendukung keberhasilan RKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya yang memuat informasi tentang rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif di Kabupaten Tapanuli Utara.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

Tarutung, 31 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA



JONNER JULIFER, ST  
PEMBINA

NIP. 19700718 200502 1 001

## DAFTAR ISI

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                          | Hal        |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                               | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                 | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                           | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                 | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                 | 3          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                              | 6          |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                          | 6          |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2021 .....</b>        | <b>9</b>   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2021 dan Capaian Renstra .. | 9          |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....                                 | 18         |
| 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....         | 20         |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....                            | 23         |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....              | 30         |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>               | <b>31</b>  |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....                           | 31         |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....                                   | 31         |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....                                           | 32         |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>         | <b>42</b>  |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                               | <b>47</b>  |
| <b>Lampiran .....</b>                                                    | <b>48</b>  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                | Hal |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021..... | 11  |
| Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP .....                                                                    | 19  |
| Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....                                                                                             | 25  |
| Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022.....                                                           | 30  |
| Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022.....                                                                  | 32  |
| Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 .....                                 | 37  |
| Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022.....                                                                         | 43  |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang memegang peranan sangat penting bagi terlaksananya suatu kegiatan pembangunan yang baik. Perencanaan harus dijadikan suatu pedoman dan landasan bagi suatu kegiatan pembangunan, dan harus dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan evaluasi terhadap kinerja dimasa yang lalu. Disamping itu perencanaan yang baik juga harus disesuaikan dengan visi dan misi dari pembangunan itu sendiri.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yaitu " Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Wisata" maka seluruh perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara harus berpedoman kepada Visi dan Misi tersebut, sehingga tercipta suatu arah pembangunan daerah yang baik dan bersinergis.

Selain itu, pengaruh isu-isu global yang sedang terjadi juga sangat berpengaruh bagi perencanaan yang akan dibuat, sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi perkembangan global yang terjadi di suatu daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam waktu kurun satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan.



Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan

yang utuh yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Renja-OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Organisasi Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Organisasi Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan, sasaran, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.



Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menyusun Renja Tahun 2023. Renja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara merupakan dokumen rencana pembangunan OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dapat mendukung keberhasilan RKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

## **1.2. Landasan Hukum**

### **Landasan Hukum Penyusunan Renja OPD Tahun 2023 :**

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024;
- 26) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023;
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025;
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024, yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun Tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 adalah:

1. Menjabarkan arahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi, dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Renja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



**BAB I. PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD**, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada SPBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD tahun-tahun sebelumnya.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**, yang berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), tantangan dan peluang serta formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

**2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**, yang merupakan peninjauan kembali terhadap rancangan rencana kerja awal dengan perbandingan dengan rencana kerja yang dilaksanakan.



- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, yang menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para stake holder, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

- BAB IV. PENUTUP**, yang menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2022**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan dapat dilihat sebagai berikut:

#### **2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan Indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



### 2.1.2. Capaian Analisis Kinerja

Secara umum rata-rata capaian kinerja yang telah dicapai tahun anggaran 2022 adalah sebesar 88,18%, dan diharapkan pada tahun 2023 ini capaian kinerja tersebut akan mencapai 100% disetiap Program dan Kegiatan. Oleh karena itu secara umum dapat dikatakan capaian kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan pada Renstra OPD yang telah direncanakan.

Adapun Program dan Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, karena sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan yang bersumber dari dana DAK, kegiatan terfokus pada pembinaan pelaku usaha dan identifikasi masalah yang termasuk pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dan untuk pengawasan penanaman modal pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Sedangkan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal tidak lagi dianggarkan. Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, beberapa rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya telah sesuai dengan kebutuhan, namun ada yang mengalami perubahan. Diantaranya ada kegiatan yang memiliki tingkat realisasi anggaran terendah yaitu Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, hal ini dikarenakan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang masuk sangat rendah, hanya 1 pengaduan masyarakat yang masuk dan telah ditindaklanjuti, dari target 10 pengaduan yang ditindaklanjuti. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 61,43% dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 67,00% yang bersumber dari dana DAK belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Kode                  | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Suh Kegiatan                                                                                                           | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023                                 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 |                            |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022                     | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023          |                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             | Target Renja Tahun 2021                                      | Realisasi Renja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                                     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022                               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                     | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                   | 5                                                                           | 6                                                            | 7                          | 8 = (7/6)             | 9                                                                                   | 10 = (5+7+9)                                                                        | 11 = (10/4)                                  |
| 2. 18.                | URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                   |                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                              |                            |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                              |
| 2. 18. 01.            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi                                                                                                                    | 100 Persen                                                                          | -                                                                           | 100 Persen                                                   | 100 Persen                 | 100%                  | 100 Persen                                                                          | 100 Persen                                                                          | 100%                                         |
| 1. 03. 01. 2. 01.     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Terlaksananya Penyusunan dokumen LAKIP Tahun Sebelumnya                                                                                                   | 1 Dokumen LAKIP                                                                     | -                                                                           | 1 Dokumen LAKIP                                              | 1 Dokumen LAKIP            | 100%                  | 1 Dokumen LAKIP                                                                     | 1 Dokumen LAKIP                                                                     | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 01. 01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat                                                                                                                      | 2 Dokumen                                                                           | -                                                                           | -                                                            | -                          | -                     | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            |
| 2. 18. 01. 2. 01. 06. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                        | 1 Dokumen LAKIP                                                                     | -                                                                           | 1 Dokumen LAKIP                                              | 1 Dokumen LAKIP            | 100%                  | 1 Dokumen LAKIP                                                                     | 1 Dokumen LAKIP                                                                     | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 01. 07. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah                                                                                                                  | 12 Laporan                                                                          | -                                                                           | -                                                            | -                          | -                     | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            |
| 2. 18. 01. 2. 02.     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD serta Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya | Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan | -                                                                           | -                                                            | -                          | -                     | Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan | Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan | -                                            |
| 2. 18. 01. 2. 02. 01. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         | 25 Orang/ Bulan                                                                     | -                                                                           | 14 Bulan                                                     | 14 Bulan                   | 100%                  | 14 Bulan                                                                            | 14 Bulan                                                                            | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 02. 03. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                      | 50 Dokumen                                                                          | -                                                                           | 12 Bulan                                                     | 12 Bulan                   | 100%                  | 12 Bulan                                                                            | 12 Bulan                                                                            | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 02. 05. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                  | 1 Dokumen Lap. Keuangan                                                             | -                                                                           | 1 Dokumen Lap. Keuangan                                      | 1 Dokumen Lap. Keuangan    | 100%                  | 1 Dokumen Lap. Keuangan                                                             | 1 Dokumen Lap. Keuangan                                                             | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 02. 07. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD           | Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD                                                                                                | 14 Laporan                                                                          | -                                                                           | -                                                            | -                          | -                     | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            |



| Kode                  | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 |                            |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                             | Target Renja Tahun 2021                                      | Realisasi Renja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022                      | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                     | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                   | 5                                                                           | 6                                                            | 7                          | 8 = (7/6)             | 9                                                              | 10 = (5+7+9)                                                               | 11 = (10/4)                                  |
| 2. 18. 01. 2. 06.     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu serta Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan                                            | -                                                                           | -                                                            | -                          | -                     | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | -                                            |
| 2. 18. 01. 2. 06. 01. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                                                                                                                                                                            | 12 Paket                                            | -                                                                           | 12 Bulan                                                     | 12 Bulan                   | 100%                  | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 06. 02. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                                                                                                                                                                                 | 12 Paket                                            | -                                                                           | 12 Bulan                                                     | 12 Bulan                   | 100%                  | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 06. 03. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga disediakan                                                                                                                                                                                                                 | 12 Paket                                            | -                                                                           | 12 Bulan                                                     | 12 Bulan                   | 100%                  | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 06. 05. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan disediakan                                                                                                                                                                                                         | 12 Paket                                            | -                                                                           | 12 Bulan                                                     | 12 Bulan                   | 100%                  | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 06. 08. | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                       | Laporan                                             | -                                                                           | 12 Bulan                                                     | 12 Bulan                   | 100%                  | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 06. 09. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                            | 12 Laporan                                          | -                                                                           | 12 Bulan                                                     | 12 Bulan                   | 100%                  | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 08.     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                  | 12 Bulan                                            | -                                                                           | -                                                            | -                          | -                     | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | -                                            |
| 2. 18. 01. 2. 08. 01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                  | 1 Laporan                                           | -                                                                           | 12 Bulan                                                     | 12 Bulan                   | 100%                  | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 08. 02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                                                                                                                                                                         | 36 Laporan                                          | -                                                                           | 12 Bulan                                                     | 12 Bulan                   | 100%                  | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 08. 04. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                                                                                                                                                                           | 12 Laporan                                          | -                                                                           | 12 Bulan                                                     | 12 Bulan                   | 100%                  | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 09.     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor                                                                                                                                                                        | 12 Bulan                                            | -                                                                           | -                                                            | -                          | -                     | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | -                                            |
| 2. 18. 01. 2. 09. 01. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya                                                                                                                                                         | 5 Unit                                              | -                                                                           | 12 Bulan                                                     | 12 Bulan                   | 100%                  | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 09. 06. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                                                                                                                                                                             | 8 Unit                                              | -                                                                           | 12 Bulan                                                     | 12 Bulan                   | 100%                  | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 09. 09. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                                                                                                                                                                      | 1 Unit                                              | -                                                                           | 12 Bulan                                                     | 12 Bulan                   | 100%                  | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | 100%                                         |
| 2. 18. 01. 2. 09. 11. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                                                                                                                                      | 6 Unit                                              | -                                                                           | 12 Bulan                                                     | 12 Bulan                   | 100%                  | 12 Bulan                                                       | 12 Bulan                                                                   | 100%                                         |



| Kode                  | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                             | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 |                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                             | Target Renja Tahun 2021                                      | Realisasi Renja Tahun 2021    | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022                      | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                     | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                   | 5                                                                           | 6                                                            | 7                             | 8 = (7/6)             | 9                                                               | 10 = (5+7+9)                                                               | 11 = (10/4)                                  |
| 2. 18. 02.            | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                              | Peningkatan Jumlah Investor                                                                                                                                                                                                 | 45 Investor                                         | -                                                                           | 30 Investor                                                  | 30 Investor                   | -                     | 40 Investor                                                     | 42 Investor                                                                | 105%                                         |
| 2. 18. 02. 2. 01.     | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                             | 10 Investor                                         | -                                                                           | -                                                            | -                             | -                     | 5 Kali                                                          | 5 Kali                                                                     | -                                            |
| 2. 18. 02. 2. 01. 01. | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Perda dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal                                                                                                                                              | 10 Investor                                         | -                                                                           | 10 Kali                                                      | 3 Kali                        | 30%                   | 10 Kali                                                         | 5 Kali                                                                     | 50%                                          |
| 2. 18. 02. 2. 02.     | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                         | Tersedianya dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                   | 2 Dokumen                                           | -                                                                           | -                                                            | -                             | -                     | 2 Dokumen                                                       | 2 Dokumen                                                                  | -                                            |
| 2. 18. 02. 2. 02. 01. | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Tapanuli Utara                                                                                                                                                             | 1 Dokumen Perda                                     | -                                                                           | 1 Dokumen                                                    | 1 Dokumen                     | 100%                  | 1 Dokumen Perda                                                 | 1 Dokumen Perda                                                            | 100%                                         |
| 2. 18. 02. 2. 02. 02. | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                                                                | Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten tapanuli utara                                                                                                                                                              | 2 Dokumen                                           | -                                                                           | 1 Dokumen                                                    | 1 Dokumen                     | 100%                  | 1 Dokumen                                                       | 1 Dokumen                                                                  | 100%                                         |
| 2. 18. 03.            | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         | Keikutsertaan pada Pameran Investasi                                                                                                                                                                                        | 6 Event                                             | -                                                                           | -                                                            | -                             | -                     | 5 Event                                                         | 3 Event                                                                    | 60%                                          |
| 2. 18. 03. 2. 01.     | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Tersusunnya Dokumen Strategi Promosi serta keikutsertaan pada kegiatan promosi penanaman modal                                                                                                                              | 1 Dokumen                                           | -                                                                           | -                                                            | -                             | -                     | 1 Dokumen                                                       | 1 Dokumen                                                                  | -                                            |
| 2. 18. 03. 2. 01. 01. | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                                             | Jumlah dokumen strategis promosi penanaman modal                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen                                           | -                                                                           | 1 Dokumen                                                    | 1 Dokumen                     | 100%                  | 1 Dokumen                                                       | 1 Dokumen                                                                  | 100%                                         |
| 2. 18. 03. 2. 01. 02. | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal                                                                                                                                                                       | 6 Event                                             | -                                                                           | 4 Event                                                      | -                             | 0%                    | 5 Event                                                         | 3 Event                                                                    | 60%                                          |
| 2. 18. 04.            | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu                                                                                                                                                                                | 91 Persen                                           | -                                                                           | 89 Persen                                                    | 91,50 Persen                  | 103%                  | 90 Persen                                                       | 93,40 Persen                                                               | 104%                                         |
| 2. 18. 04. 2. 01.     | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah | 650 Dokumen dan 15 pengaduan                        | -                                                                           | 650 Dokumen dan 15 pengaduan                                 | 1300 Dokumen dan 12 pengaduan | -                     | 650 Dokumen dan 15 pengaduan                                    | 650 Dokumen dan 15 pengaduan                                               | -                                            |
| 2. 18. 04. 2. 01. 01. | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik     | Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                                               | 650 Pelaku usaha                                    | -                                                                           | 650 Dokumen                                                  | 1.300 Dokumen                 | 200%                  | 650 Dokumen                                                     | 940 Dokumen                                                                | 142%                                         |
| 2. 18. 04. 2. 01. 02. | Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal                                                               | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal                                                                                    | 20 Kegiatan Usaha                                   | -                                                                           | 15 Pengaduan                                                 | 12 Pengaduan                  | 80%                   | 10 Pengaduan                                                    | 1 Pengaduan                                                                | 10%                                          |



| Kode                  | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kejuaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 |                                      |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                             | Target Renja Tahun 2021                                      | Realisasi Renja Tahun 2021           | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022                      | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                     | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                                   | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                    | 8 = (7/6)             | 9                                                               | 10 = (5+7+9)                                                               | 11 = (10/4)                                  |
| 2. 18. 04. 2. 01. 03. | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                                        | jumlah Orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                                                                     | 10 Orang                                            | -                                                                           | 15 Pengaduan                                                 | 12 Pengaduan                         | 80%                   | 10 Pengaduan                                                    | 1 Pengaduan                                                                | 10%                                          |
| 2. 18. 04. 2. 01. 04. | Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah                                                                                        | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah                                                                                 | 10 Kegiatan Usaha                                   | -                                                                           | 15 Pengaduan                                                 | 12 Pengaduan                         | 80%                   | 10 Pengaduan                                                    | 1 Pengaduan                                                                | 10%                                          |
| 2. 18. 05.            | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                          | Persentase Izin yang Dikendalikan                                                                                                                                                                                | 75 Persen                                           | -                                                                           | 70 Persen                                                    | 96,7 Persen                          | 138%                  | 70 Persen                                                       | 70 Persen                                                                  | 100%                                         |
| 2. 18. 05. 2. 01.     | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                    | Tersedianya profil hasil pemantauan dan pengawasan, terlaksananya monitoring kepemilikan izin dan bimtek/sosialisasi kemudahan berusaha serta validasi faktual dan berita acara pengawasan terhadap pelaku usaha | 350 pelaku usaha, 70 pemilik bangunan dan 80 BAP    | -                                                                           | -                                                            | -                                    | -                     | 350 pelaku usaha, 35 Kegiatan Usaha                             | 223 pelaku usaha, 59 Kegiatan Usaha                                        | -                                            |
| 2. 18. 05. 2. 01. 01. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pelaksanaan penanaman modal                                                                                      | 40 Kegiatan Usaha                                   | -                                                                           | 30 pelaku usaha, 70 pemilik bangunan                         | 29 pelaku usaha, 70 pemilik bangunan | 96,7%                 | -                                                               | -                                                                          | -                                            |
| 2. 18. 05. 2. 01. 01. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal                                                                                                                                       | 350 pelaku usaha                                    | -                                                                           | 350 pelaku usaha                                             | 256 pelaku usaha                     | 73.1%                 | 350 pelaku usaha                                                | 223 pelaku usaha                                                           | 63.7%                                        |
| 2. 18. 05. 2. 01. 01. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan, pelaksanaan penanaman modal                                                                                                | 40 kegiatan usaha                                   | -                                                                           | 30 pelaku usaha, 70 pemilik bangunan                         | 29 pelaku usaha, 70 pemilik bangunan | 96,7%                 | 35 Kegiatan Usaha                                               | 59 Kegiatan Usaha                                                          | 168.6%                                       |
| 2. 18. 06.            | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>                                                                                             | Persentase Data dan Informasi yang Dikendalikan                                                                                                                                                                  | 80 Persen                                           | -                                                                           | 75 Persen                                                    | 75 Persen                            | 100%                  | 78 Persen                                                       | 78 Persen                                                                  | 100%                                         |
| 2. 18. 06. 2. 01.     | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                           | Terlaksananya pemeliharaan ISO, survey IKM dan LKPM                                                                                                                                                              | 1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM                      | -                                                                           | 1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM                               | 1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM       | 100%                  | 1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM                                  | 1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM                                             | 100%                                         |
| 2. 18. 06. 2. 01. 01. | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan                                           | 1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM                      | -                                                                           | 1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM                               | 1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM       | 100%                  | 1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM                                  | 1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM                                             | 100%                                         |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 |                            |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 |                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                |                                                 |                                                     |                                                                             | Target Renja Tahun 2021                                      | Realisasi Renja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022                      | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                              | 3                                               | 4                                                   | 5                                                                           | 6                                                            | 7                          | 8 = (7/6)             | 9                                                               | 10 = (5+7+9)                                                               | 11 = (10/4)                                  |
| 1    |                                                                |                                                 |                                                     |                                                                             |                                                              |                            |                       |                                                                 |                                                                            |                                              |
| 1    | 01                                                             |                                                 |                                                     |                                                                             |                                                              |                            |                       |                                                                 |                                                                            |                                              |
| 1    | 01                                                             | 01                                              |                                                     |                                                                             |                                                              |                            |                       |                                                                 |                                                                            |                                              |
| 1    | 01                                                             | 01                                              | 01                                                  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran              |                            |                       |                                                                 |                                                                            |                                              |
| 1    | 01                                                             | 01                                              | 01                                                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                              | Tersedianya Jasa surat Menyurat                              | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 02                                                             | 01                                              | 02                                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     | Tersedianya jasa Komunikasi,SDA & Listrik                    | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 03                                                             | 01                                              | 03                                                  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                       | Tersedianya honor pejabat pengelola keuangan & aset          | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 04                                                             | 01                                              | 04                                                  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                           | Tersedianya Bahan dan alat kebersihan kantor                 | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 05                                                             | 01                                              | 05                                                  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 06                                                             | 01                                              | 06                                                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan                     | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 07                                                             | 01                                              | 07                                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor              | Tersedianya komponen instalasi dan penerangan Gedung Kantor  | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 08                                                             | 01                                              | 08                                                  | Penyediaan Makanan Dan Minuman                                              | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat                        | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 09                                                             | 01                                              | 09                                                  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                        | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah        | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 10                                                             | 01                                              | 10                                                  | Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah                                         | Terlaksananya koordinasi & konsultasi dalam daerah           | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 11                                                             | 01                                              | 11                                                  | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap                                      | Tersedianya Jasa Pegawai Honorer/tidak tetap                 | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 01                                                             | 02                                              |                                                     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                           |                                                              |                            |                       |                                                                 |                                                                            |                                              |
| 1    | 01                                                             | 02                                              | 01                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional      | Tersedianya biaya pemeliharaan                               | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 01                                                             | 02                                              | 12                                                  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                    | Terpeliharanya Gedung Kantor                                 | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 01                                                             | 02                                              | 02                                                  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                          | Terpeliharanya Peralatan Kantor                              | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 01                                                             | 02                                              | 03                                                  | Pengadaan Perlengkapan Kantor                                               | Tersedianya Perlengkapan kantor                              | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 01                                                             | 02                                              | 04                                                  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor                              | Terpeliharanya perlengkapan kantor                           | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 01                                                             | 02                                              | 05                                                  | Pembuatan Lanjutan Jerajak Belakang Gedung Kantor                           | Tersedianya Jerajak dibelakang gedung kantor                 | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 01                                                             | 02                                              | 06                                                  | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua                                          | Tersedianya kendaraan dinas roda dua                         | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |
| 1    | 01                                                             | 02                                              | 07                                                  | Pengadaan Peralatan Kantor                                                  | Tersedianya Peralatan Kantor                                 | -                          | -                     | -                                                               | -                                                                          |                                              |



| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023                                         | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuangan Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021              |                            |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 |                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                 |                                                 |                                                                                             |                                                                             | Target Renja Tahun 2021                                                   | Realisasi Renja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022                      | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                               | 3                                               | 4                                                                                           | 5                                                                           | 6                                                                         | 7                          | 8 = (7/6)             | 9                                                               | 10 = (5+7+9)                                                               | 11 = (10/4)                                  |
| 1    | 01                                                              | 03                                              | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                                |                                                                             | -                                                                         |                            |                       |                                                                 |                                                                            |                                              |
| 1    | 01                                                              | 03                                              | 01                                                                                          | Pengadaan Pakaian Dinas Motif Ulos                                          | Tersedianya Pakaian Dinas khusus hari-hari tertentu                       | -                          | Nihil                 | -                                                               | -                                                                          | -                                            |
| 1    | 01                                                              | 04                                              | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>                                    |                                                                             |                                                                           |                            |                       |                                                                 |                                                                            |                                              |
| 1    | 01                                                              | 04                                              | 01                                                                                          | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                             | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal                             | -                          | Nihil                 | -                                                               | -                                                                          | -                                            |
| 1    | 01                                                              | 05                                              | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>       |                                                                             |                                                                           |                            |                       |                                                                 |                                                                            |                                              |
| 1    | 01                                                              | 05                                              | 01                                                                                          | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD       | Tersusunnya LAKIP                                                         | -                          | 1 Dokumen             | -                                                               | -                                                                          | -                                            |
| 1    | 01                                                              | 05                                              | 02                                                                                          | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                     | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun                                  | -                          | 1 Dokumen             | -                                                               | -                                                                          | -                                            |
| 1    | 01                                                              | 05                                              | 03                                                                                          | Penyusunan Laporan Realisasi Penerbitan Izin Bulanan, Triwulan dan Tahunan  | Tersusunnya Laporan Realisasi Penerbitan Izin Bulanan dan Triwulan        | -                          | Nihil                 | -                                                               | -                                                                          | -                                            |
| 1    | 01                                                              | 05                                              | 04                                                                                          | Penyusunan Renja, RKA dan DPA                                               | Tersusunnya Renja,RKA dan DPA                                             | -                          | Nihil                 | -                                                               | -                                                                          | -                                            |
| 1    | 01                                                              | 06                                              | <b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>                                 |                                                                             |                                                                           |                            |                       |                                                                 |                                                                            |                                              |
| 1    | 01                                                              | 06                                              | 01                                                                                          | Sosialisasi Informasi Perizinan dan Non Perizinan                           | Tersedianya biaya Sosialisasi Informasi Perizinan dan Non Perizinan       | -                          | 1 Media               | -                                                               | -                                                                          | -                                            |
| 1    | 01                                                              | 06                                              | 02                                                                                          | Pengembangan Aplikasi Perizinan Elektronik (e-marsada)                      | Tersedianya biaya pengembangan Aplikasi Perizinan Elektronik ( e-marsada) | -                          | Nihil                 | -                                                               | -                                                                          | -                                            |
| 1    | 01                                                              | 06                                              | 03                                                                                          | Penyediaan Jasa Administrasi SPIPISE dan SIPID                              |                                                                           |                            | Nihil                 | -                                                               | -                                                                          | -                                            |
| 1    | 01                                                              | 07                                              | <b>Program Penataan Dan Penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pelayanan Perizinan</b> |                                                                             |                                                                           |                            |                       |                                                                 |                                                                            |                                              |
| 1    | 01                                                              | 07                                              | 01                                                                                          | Penyediaan Jasa Pembina dan Tim Teknis Perizinan                            | Tersedianya Jasa Pembina Tim Teknis                                       | -                          | 1 tahun               | -                                                               | -                                                                          | -                                            |
| 1    | 01                                                              | 07                                              | 02                                                                                          | Penerapan dan Pemeliharaan ISO                                              | Tersedianya biaya Penerapan dan Pemeliharaan ISO                          | -                          | 1 Sertifikat          | -                                                               | -                                                                          | -                                            |
| 1    | 01                                                              | 07                                              | 03                                                                                          | Penyediaan Jasa Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan                     | Tersedianya Biaya Jasa Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan            | -                          | 1 tahun               | -                                                               | -                                                                          | -                                            |
| 1    | 01                                                              | 08                                              | <b>Program Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>                                              |                                                                             |                                                                           |                            |                       |                                                                 |                                                                            |                                              |
| 1    | 01                                                              | 08                                              | 01                                                                                          | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat                                           | Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat                           | -                          | 87,79                 | -                                                               | -                                                                          | -                                            |



| Kode       | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                       | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 |                            |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 |                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|            |                                                                                   |                                                                       |                                                     |                                                                             | Target Renja Tahun 2021                                      | Realisasi Renja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022                      | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1          | 2                                                                                 | 3                                                                     | 4                                                   | 5                                                                           | 6                                                            | 7                          | 8 = (7/6)             | 9                                                              | 10 = {5+7+9}                                                               | 11 = {10/4}                                  |
| 01 08 02   | Fasilitas /Mediasi Permasalahan Pengaduan di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan | Terlaksananya fasilitasi/mediasi permasalahan/pengaduan               | -                                                   | 1 tahun                                                                     | -                                                            | -                          |                       | -                                                              | -                                                                          |                                              |
| 1 01 09    | <b>Program Pengembangan Informasi Publik</b>                                      |                                                                       |                                                     |                                                                             |                                                              |                            |                       |                                                                |                                                                            |                                              |
| 1 01 09 01 | Evaluasi SOP Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan                          | Terlaksananya SOP Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan         | -                                                   | Nihil                                                                       | -                                                            | -                          |                       | -                                                              | -                                                                          |                                              |
| 1 01 10    | <b>Program Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Perizinan</b>                     |                                                                       |                                                     |                                                                             |                                                              |                            |                       |                                                                |                                                                            |                                              |
| 1 01 10 01 | Monitoring, Pengawasan Serta Pengendalian Pra dan Pasca Penerbitan Izin           | Terlaksananya Wasdal dan evaluasi perizinan                           | -                                                   | 1 tahun                                                                     | -                                                            | -                          |                       | -                                                              | -                                                                          |                                              |
| 1 01 11    | <b>Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>                       |                                                                       |                                                     |                                                                             |                                                              |                            |                       |                                                                |                                                                            |                                              |
| 1 01 11 01 | Inventarisasi Potensi Investasi di Kabupaten Tapanuli Utara                       | Teraksananya Inventarisasi potensi penanaman modal                    | -                                                   | 1 tahun                                                                     | -                                                            | -                          |                       | -                                                              | -                                                                          |                                              |
| 1 01 11 02 | Pembuatan Alat Peraga dan Bahan Promosi Investasi                                 | Tersedianya Alat Peraga dan bahan Promosi                             | -                                                   | 1 tahun                                                                     | -                                                            | -                          |                       | -                                                              | -                                                                          |                                              |
| 1 01 11 03 | Partisipasi Pada Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Daerah                           | Tersedianya biaya Partisipasi Promosi Dalam dan Luar Daerah           | -                                                   | Nihil                                                                       | -                                                            | -                          |                       | -                                                              | -                                                                          |                                              |
| 1 01 11 04 | Fasilitasi Penjajakan Kerjasama Investasi                                         | Terlaksananya Penjajakan Kerjasama Investasi                          | -                                                   | 1 tahun                                                                     | -                                                            | -                          |                       | -                                                              | -                                                                          |                                              |
| 1 01 12    | <b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>                |                                                                       |                                                     |                                                                             |                                                              |                            |                       |                                                                |                                                                            |                                              |
| 1 01 12 01 | Penyusunan Draft Produk Hukum/ Peraturan Daerah                                   | Tersusunnya Produk Hukum/ Peraturan Daerah                            | -                                                   | 1 tahun                                                                     | -                                                            | -                          |                       | -                                                              | -                                                                          |                                              |
| 1 01 12 02 | Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal                                             | Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal                   | -                                                   | Nihil                                                                       | -                                                            | -                          |                       | -                                                              | -                                                                          |                                              |
| 1 01 12 03 | Pendampingan dan Pemberian Kemudahan Investasi                                    | Terlaksananya Pendampingan dan Pemberian Kemudahan Investasi          | -                                                   | 1 tahun                                                                     | -                                                            | -                          |                       | -                                                              | -                                                                          |                                              |
| 1 01 12 04 | Koordinasi Antar Lembaga Dalam Perencanaan dan Pengembangan Investasi             | Terlaksananya koordinasi dalam Perencanaan dan Pengembangan Investasi | -                                                   | 1 tahun                                                                     | -                                                            | -                          |                       | -                                                              | -                                                                          |                                              |
| 1 01 12 05 | Forum Dialog Pemerintah Dengan Badan Usaha                                        | Terlaksananya Forum Dialog Pemerintah dengan Badan Usaha              | -                                                   | Nihil                                                                       | -                                                            | -                          |                       | -                                                              | -                                                                          |                                              |
| 1 01 12 06 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal                                           |                                                                       | -                                                   | Nihil                                                                       | -                                                            | -                          |                       | -                                                              | -                                                                          |                                              |

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang berhubungan dengan penanaman modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan terpadu maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bekerja sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan adanya pedoman pada SOP tersebut, maka pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus dijalankan dengan baik.

Pada tahun 2016 sampai tahun 2021, Dinas penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Utara telah meraih Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal peningkatan pelayanan public, dan mendapatkan resertifikasi ISO 9001:2015 pada tahun 2022. Dengan raihan sertifikat ISO tersebut, maka perbaikan sistem pelayanan harus dilakukan setiap waktu sehingga diperoleh tingkat pelayanan yang prima. Hal ini dapat terlihat dari cakupan pelayanan perizinan yang ditindaklanjuti tercapai 100%. Untuk itu diharapkan di tahun 2023 untuk menaikkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu diharapkan persentase izin yang terbit tepat waktu dapat mencapai 91%, terdapat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Tapanuli Utara**

| No | Indikator                                                  | SPM/Standar Nasional                                                  | IKK                                                    | Target Renstra Perangkat Daerah |                         |                       |                         | Realisasi Capaian       |                         | Proyeksi              |                         | Catatan Analisis |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|    |                                                            |                                                                       |                                                        | Tahun 2021<br>(Thn n-2)         | Tahun 2022<br>(Thn n-1) | Tahun 2023<br>(Thn n) | Tahun 2024<br>(Thn n+1) | Tahun 2021<br>(Thn n-2) | Tahun 2022<br>(Thn n-1) | Tahun 2023<br>(Thn n) | Tahun 2024<br>(Thn n+1) |                  |
| 1  | 2                                                          | 3                                                                     | 4                                                      | 5                               | 6                       | 7                     | 8                       | 9                       | 10                      | 11                    | 12                      | 13               |
| 1  | Nilai Investasi                                            | Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021                                     |                                                        | -                               | 100%                    | 100%                  | 100%                    | -                       | 220.9%                  | 100%                  | 100%                    |                  |
| 2  | Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu               | Perbup Nomor 61 Tahun 2020, dan Standar Pelayanan Nomor 20 Tahun 2021 |                                                        | -                               | 90%                     | 91%                   | 92%                     | -                       | 93.40%                  | 91%                   | 92%                     |                  |
| 4  | Persentase Peningkatan Nilai Investasi                     | Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021                                     | Persentase Peningkatan investasi di kabupaten/kota     | 7%                              | -                       | -                     | -                       | -62.7%                  | -                       | -                     | -                       |                  |
| 5  | Cakupan Pelayanan Perizinan yang ditindaklanjuti           | Perbup Nomor 61 Tahun 2020, dan Standar Pelayanan Nomor 20 Tahun 2021 | Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | 100%                            | -                       | -                     | -                       | 100%                    | -                       | -                     | -                       |                  |
| 6  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                           | Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat                             | 100%                            | 100%                    | 100%                  | 100%                    | 100.58%                 | 101.60%                 | 100%                  | 100%                    |                  |
| 7  | Persentase Temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti | Permendagri Nomor 77 Tahun 2020                                       | Temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti        | 95%                             | -                       | -                     | -                       | 105.26%                 | -                       | -                     | -                       |                  |
| 8  | Nilai hasil evaluasi AKIP                                  | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020                                       | Nilai AKIP yang diberikan Inspektorat Daerah           | 100%                            | -                       | -                     | -                       | 88.79%                  | -                       | -                     | -                       |                  |

note : semua target (semua kolom) diisi dgn persentase (%) karena bersifat Outcome

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tugas dan fungsi antar lain:

1. Penyelenggaraan penyusunan program Dinas;
2. Penyelenggaraan promosi, perencanaan, kerjasama dan pengembangan penanaman modal;
3. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Utara difokuskan pada peningkatan nilai investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan, promosi, dan penanganan pengaduan.

### 2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini adalah **Rendahnya Nilai Investasi**, yang disebabkan oleh:

1. Belum optimalnya informasi dan strategi promosi pengembangan potensi daerah yang berbasis IT di bidang penanaman modal;
2. Kurangnya regulasi di bidang penanaman modal,
  - a. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, dan belum maksimalnya RUPM digunakan sebagai masterplan untuk pengembangan investasi;
  - b. Belum adanya regulasi yang mengatur pemberian fasilitasi/insentif kepada para pelaku usaha.



3. Kurangnya kualitas pelayanan, hal ini dikarenakan oleh:
  - a. Minimnya sarana dan prasarana;
  - b. Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia;
  - c. Kurangnya koordinasi antar instansi teknis.

### 2.3.2 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan yaitu **"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"**.

Dalam rangka pencapaian visi ditetapkan pula Misi Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan iptek dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government.

Dari penjabaran Misi diatas, sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pemangku Misi ke-2.



Sebagai pemangku dari misi ke-2 yaitu Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal, yang bertujuan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, DPMPTSP diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Tapanuli Utara melalui pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan yaitu, **Meningkatnya Nilai Investasi**. Dengan sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan Nilai Investasi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pengelolaan seluruh kegiatan Penanaman Modal dilakukan dengan memperhatikan dan berpedoman kepada kondisi alam dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara tanpa mengurangi fasilitatif kepada investor dalam rangka pemberian kemudahan – kemudahan dalam investasi dan pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel. Sebagai OPD yang bertugas menangani penerbitan perizinan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha didalam pengurusan izin. Berbagai kemudahan telah diberikan, yang diharapkan dapat menstimulasi animo masyarakat didalam mengurus izin yang dibutuhkannya.

### 2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan antara lain: keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan alokasi anggaran untuk melaksanakan

kegiatan baik untuk peningkatan Kapasitas SDM, monitoring, maupun peninjauan lapangan.

Dengan keterbatasan yang dirasakan diatas, maka pelayanan yang dilaksanakan tidak akan dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan di tahun-tahun yang akan datang. Disamping itu, perlu juga dilihat peluang dan potensi yang harus dikembangkan dan diraih untuk meningkatkan pelayanan terpadu yang nantinya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dilihat perkembangan dunia usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, terlihat jelas bahwa potensi untuk mengembangkan perizinan masih sangat mungkin untuk dilaksanakan. Hal inilah yang perlu dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **2.3.4 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023**

Sebagai garda depan investasi di Kabupaten Tapanuli Utara yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk meningkatkan nilai investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan nilai investasi, serta pertumbuhan dan pengembangan potensi unggulan daerah, beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal sebagai masterplan bagi pengembangan investasi.
2. Penyusunan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
3. Penyusunan Strategi dan Peningkatan Promosi penanaman modal yang lebih inovatif.
4. Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan.
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai.

6. Peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat
7. Pemuktahiran data potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten Tapanuli Utara
8. Peningkatan kualitas Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
9. Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada para pelaku usaha/investor agar taat dalam pelaporan LKPM

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Apabila kita membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terdapat kesamaan. Adapun kesamaan tersebut terjadi karena adanya identifikasi permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan untuk dapat segera dilaksanakan. Perbandingan ini sangat perlu dilakukan untuk dapat melihat apakah rancangan awal OPD yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan riil.

Akan tetapi, disamping itu juga terdapat adanya perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya kebutuhan akan suatu kegiatan yang tidak diakomodir pada rancangan awal RKPD. Perbedaan yang terjadi ini tidaklah mengurangi esensi atau pun bertentangan dengan Rancangan awal RKPD, hanya saja untuk menyikapi kekurangan-kekurangan didalam penyusunan sebelumnya serta sebagai jawaban atas antisipasi isu-isu strategis yang berkembang secara dinamis, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.3  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

| No | Rancangan Awal RKPD                                                                   |         |                                                                                                                                                                        |                            |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                                              |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                               | Catatan Penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan                                                                      | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target Capaian             | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan                                                                      | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target Capaian Kinerja                                                              | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                 |
| 1  | 2                                                                                     | 3       | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                   | 7                                                                                     | 8       | 9                                                                                                                                                                      | 10                                                                                  | 11                            | 12              |
|    | URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                   |         |                                                                                                                                                                        |                            |                     | URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                   |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                               |                 |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | DPMPTSP | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi                                                                                                                                 | 100 Persen                 | 2,616,262,792.00    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | DPMPTSP | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi                                                                                                                                 | 100 Persen                                                                          | #VALUE!                       |                 |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | DPMPTSP | Terlaksananya Penyusunan dokumen LAKIP Tahun Sebelumnya                                                                                                                | 1 Dokumen LAKIP            | 11,999,800.00       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | DPMPTSP | Terlaksananya Penyusunan dokumen LAKIP Tahun Sebelumnya                                                                                                                | 1 Dokumen LAKIP                                                                     | 39,999,800.00                 |                 |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | DPMPTSP | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat                                                                                                                                   | 2 Dokumen                  | 5,000,000.00        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | DPMPTSP | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat                                                                                                                                   | 2 Dokumen                                                                           | 4,999,900.00                  |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DPMPTSP | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                  | 3,499,800.00        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DPMPTSP | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi                            | 5,000,000.00                  |                 |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | DPMPTSP | Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah                                                                                                                               | 12 Laporan                 | 3,500,000.00        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | DPMPTSP | Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah                                                                                                                               | 12 Laporan                                                                          | 29,999,900.00                 |                 |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | DPMPTSP | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD serta Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya              | 12 bulan                   | 2,348,002,792.00    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | DPMPTSP | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD serta Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya              | Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan | 2,269,286,172.00              |                 |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | DPMPTSP | Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 25 Orang/ Bulan            | 2,297,272,192.00    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | DPMPTSP | Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 25 Orang/ Bulan                                                                     | 2,207,736,272.00              |                 |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | DPMPTSP | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                   | 50 Dokumen                 | 43,730,600.00       | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | DPMPTSP | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                   | 50 Dokumen                                                                          | 53,050,000.00                 |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | DPMPTSP | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                               | 1 dokumen Laporan Keuangan | 3,500,000.00        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | DPMPTSP | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                               | 1 dokumen Laporan Keuangan                                                          | 5,000,000.00                  |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD       | DPMPTSP | Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD                                                                                                           | 14 Laporan                 | 3,500,000.00        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD        | DPMPTSP | Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD                                                                                                           | 14 Laporan                                                                          | 3,499,900.00                  |                 |



| No | Rancangan Awal RKPD                                               |         |                                                                                     |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                          |         |                                                                                     |                        |                               | Catatan Penting |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan                                                  | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan                                                  | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                 |
| 1  | 2                                                                 | 3       | 4                                                                                   | 5              | 6                   | 7                                                                 | 8       | 9                                                                                   | 10                     | 11                            | 12              |
|    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | DPMPTSP | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah       | 12 bulan       | 3,000,000.00        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | DPMPTSP | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah       | 12 bulan               | -                             |                 |
|    | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | DPMPTSP | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    | 3 Laporan      | 3,000,000.00        | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | DPMPTSP | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    |                        |                               |                 |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | DPMPTSP | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                    | 12 bulan       | 28,000,000.00       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | DPMPTSP | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                    | 12 bulan               | -                             |                 |
|    | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | DPMPTSP | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | Dokumen        | 3,000,000.00        | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | DPMPTSP | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    |                        | -                             |                 |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | DPMPTSP | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang        | 25,000,000.00       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | DPMPTSP | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                        | -                             |                 |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | DPMPTSP | Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | 12 bulan       | 310,260,200.00      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | DPMPTSP | Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | 12 bulan               | 291,121,800.00                |                 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | DPMPTSP | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan  | 12 Paket       | 9,000,000.00        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | DPMPTSP | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan  | 12 Paket               | 8,999,900.00                  |                 |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | DPMPTSP | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                      | 12 Paket       | 63,260,200.00       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | DPMPTSP | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                      | 12 Paket               | 63,260,200.00                 |                 |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | DPMPTSP | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga disediakan                                      | 12 Paket       | 25,000,000.00       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | DPMPTSP | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga disediakan                                      | 12 Paket               | 28,864,900.00                 |                 |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | DPMPTSP | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan disediakan                                | 12 Paket       | 30,000,000.00       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | DPMPTSP | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan disediakan                                | 12 Paket               | 29,999,800.00                 |                 |
|    | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | DPMPTSP | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                            | Laporan        | 3,000,000.00        | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | DPMPTSP | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                            | Laporan                | -                             |                 |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | DPMPTSP | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan     | 180,000,000.00      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | DPMPTSP | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan             | 159,997,000.00                |                 |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | DPMPTSP | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                               | 12 bulan       | 337,674,560.00      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | DPMPTSP | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                               | 12 bulan               | 20,000,000.00                 |                 |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | DPMPTSP | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | 3 Unit         | 317,674,560.00      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | DPMPTSP | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan |                        | -                             |                 |
|    | Pengadaan Mebel                                                   | DPMPTSP | Jumlah Unit Mebel yang disediakan                                                   | 2 Unit         | 10,000,000.00       | Pengadaan Mebel                                                   | DPMPTSP | Jumlah Unit Mebel yang disediakan                                                   |                        | -                             |                 |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | DPMPTSP | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan                             | 1 Unit         | 10,000,000.00       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | DPMPTSP | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan                             | 12 bulan               | 20,000,000.00                 |                 |



| No | Rancangan Awal RKPD                                                                                                |         |                                                                                                        |                  |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                           |         |                                                                                                        |                        |                                   | Catatan Penting |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan                                                                                                   | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                      | Target Capaian   | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan                                                                                                   | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |                 |
| 1  | 2                                                                                                                  | 3       | 4                                                                                                      | 5                | 6                   | 7                                                                                                                  | 8       | 9                                                                                                      | 10                     | 11                                | 12              |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | DPMPTSP | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan                   | 0                |                     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | DPMPTSP | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan                   |                        |                                   |                 |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | DPMPTSP | Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                          | 12 Bulan         | 162,712,875.00      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | DPMPTSP | Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                          | 12 bulan               | 161,712,000.00                    |                 |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | DPMPTSP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan        | 2,000,000.00        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | DPMPTSP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan              | 1,000,000.00                      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | DPMPTSP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | 36 Laporan       | 51,553,675.00       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | DPMPTSP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | 36 Laporan             | 51,552,800.00                     |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | DPMPTSP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 12 Laporan       | 109,159,200.00      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | DPMPTSP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 12 Laporan             | 109,159,200.00                    |                 |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | DPMPTSP | Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor                | 12 Bulan         | 126,349,773.00      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | DPMPTSP | Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor                | 12 Bulan               | 122,771,600.00                    |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DPMPTSP | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 5 Unit           | 75,717,502.00       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DPMPTSP | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 5 Unit                 | 79,000,500.00                     |                 |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | DPMPTSP | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     | 8 Unit           | 8,192,910.00        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | DPMPTSP | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     | 8 Unit                 | 5,959,900.00                      |                 |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | DPMPTSP | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara                                              | 1 Unit           | 24,617,495.00       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | DPMPTSP | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara                                              | 1 Unit                 | 19,998,000.00                     |                 |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | DPMPTSP | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara              | 6 Unit           | 17,821,866.00       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | DPMPTSP | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara              | 6 Unit                 | 17,813,200.00                     |                 |
| 2  | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                         | DPMPTSP | Peningkatan Jumlah Investor                                                                            | 45 Investor      | 344,000,000.00      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                         | DPMPTSP | Peningkatan Jumlah Investor                                                                            | 45 Investor            | 136,702,100.00                    |                 |
|    | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | DPMPTSP | Tersedianya pendampingan dan fasilitasi serta forum dialog pemerintah dengan badan usaha               | 12 Bulan         | 199,000,000.00      | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | DPMPTSP | Tersedianya pendampingan dan fasilitasi serta forum dialog pemerintah dengan badan usaha               | 12 Bulan               | 136,702,100.00                    |                 |
|    | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                     | DPMPTSP | Jumlah Perda dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal                         | 1 Dok            | 169,000,000.00      | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                     | DPMPTSP | Jumlah Perda dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal                         | 1 Dok                  | 119,963,100.00                    |                 |
|    | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                    | DPMPTSP | Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha dari yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah | 5 Kegiatan Usaha | 30,000,000.00       | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                    | DPMPTSP | Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha dari yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah | 5 Kegiatan Usaha       | 16,739,000.00                     |                 |



| No | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                | Catatan Penting |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan                                                                                                                        | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian    | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan                                                                                                                        | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                 |
| 1  | 2                                                                                                                                       | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 6                   | 7                                                                                                                                       | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                           | 10                     | 11                             | 12              |
|    | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                         | DPMPTSP | Terlaksananya persiapan penyusunan RUPM dan tersedianya peta potensi dan peluang usaha                                                                                                                                      | 2 Dokumen         | 145,000,000.00      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                         | DPMPTSP | Terlaksananya persiapan penyusunan RUPM dan tersedianya peta potensi dan peluang usaha                                                                                                                                      | 2 Dokumen              | 33,478,000.00                  |                 |
|    | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | DPMPTSP | Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Tapanuli Utara                                                                                                                                                             | 1 Dokumen         | 100,000,000.00      | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | DPMPTSP | Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Tapanuli Utara                                                                                                                                                             | 1 Dokumen              | 16,739,000.00                  |                 |
|    | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                                                                | DPMPTSP | Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten tapanuli utara                                                                                                                                                              | 1 Dokumen         | 45,000,000.00       | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                                                                | DPMPTSP | Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten tapanuli utara                                                                                                                                                              | 1 Dokumen              | 16,739,000.00                  |                 |
| 3  | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         | DPMPTSP | Keikutsertaan pada Pameran Investasi                                                                                                                                                                                        | 6 Event           | 53,098,500.00       | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         | DPMPTSP | Keikutsertaan pada Pameran Investasi                                                                                                                                                                                        | 6 Event                | 225,470,700.00                 |                 |
|    | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | DPMPTSP | Jumlah Dokumen Strategi Promosi serta keikutsertaan pada kegiatan promosi penanaman modal                                                                                                                                   | 2 Dok             | 53,098,500.00       | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | DPMPTSP | Jumlah Dokumen Strategi Promosi serta keikutsertaan pada kegiatan promosi penanaman modal                                                                                                                                   | 2 Dok                  | 225,470,700.00                 |                 |
|    | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                                             | DPMPTSP | Jumlah dokumen strategis promosi penanaman modal                                                                                                                                                                            | 1 Dok             | 26,765,500.00       | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                                             | DPMPTSP | Jumlah dokumen strategis promosi penanaman modal                                                                                                                                                                            | 1 Dok                  | 87,400,300.00                  |                 |
|    | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | DPMPTSP | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal                                                                                                                                                                       | 1 Dok             | 26,333,000.00       | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | DPMPTSP | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal                                                                                                                                                                       | 1 Dok                  | 138,070,400.00                 |                 |
| 4  | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | DPMPTSP | Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu                                                                                                                                                                                | 91 Persen         | 117,595,800.00      | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | DPMPTSP | Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu                                                                                                                                                                                | 91 Persen              | 122,595,800.00                 |                 |
|    | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | DPMPTSP | Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah | 12 Bulan          | 117,595,800.00      | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | DPMPTSP | Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah | 12 Bulan               | 122,595,800.00                 |                 |
|    | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik     | DPMPTSP | Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                                               | 650 Pelaku usaha  | 75,000,000.00       | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik     | DPMPTSP | Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                                               | 650 Pelaku usaha       | 80,000,000.00                  |                 |
|    | Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal                                                               | DPMPTSP | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal                                                                                    | 20 Kegiatan Usaha | 18,636,100.00       | Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal                                                               | DPMPTSP | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal                                                                                    | 20 Kegiatan Usaha      | 18,636,300.00                  |                 |
|    | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan               | DPMPTSP | jumlah Orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                                                                                | 10 Orang          | 13,959,700.00       | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan               | DPMPTSP | jumlah Orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                                                                                | 10 Orang               | 13,959,500.00                  |                 |



| No | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                        |                                     |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                        |                        |                               | Catatan Penting |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan                                                                                                                                                 | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target Capaian                      | Pagu Indikatif (Rp)     | Program/Kegiatan                                                                                                                                                 | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                 |
| 1  | 2                                                                                                                                                                | 3       | 4                                                                                                                                                                      | 5                                   | 6                       | 7                                                                                                                                                                | 8       | 9                                                                                                                                                                      | 10                     | 11                            | 12              |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah                                                                                        | DPMPTSP | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah                                       | 10 Kegiatan Usaha                   | 10,000,000.00           | Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah                                                                                        | DPMPTSP | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah                                       | 10 Kegiatan Usaha      | 10,000,000.00                 |                 |
| 5  | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                 | DPMPTSP | Persentase Izin yang Dikendalikan                                                                                                                                      | 75 Persen                           | 407,613,000.00          | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                 | DPMPTSP | Persentase Izin yang Dikendalikan                                                                                                                                      | 75 Persen              | 541,612,800.00                |                 |
|    | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | DPMPTSP | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal                   | 380 pelaku usaha, 29 Kegiatan Usaha | 407,613,000.00          | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | DPMPTSP | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal                   | 1 Sertifikat           | 541,612,800.00                |                 |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | DPMPTSP | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pelaksanaan penanaman modal                                            | 40 Kegiatan Usaha                   | 115,899,900.00          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | DPMPTSP | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pelaksanaan penanaman modal                                            | 40 Kegiatan Usaha      | 32,829,000.00                 |                 |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                | DPMPTSP | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal                                                                                             | 350 pelaku usaha                    | 190,283,100.00          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                | DPMPTSP | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal                                                                                             | 350 pelaku usaha       | 456,386,800.00                | DAK Non Fisik   |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | DPMPTSP | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan, pelaksanaan penanaman modal                                                      | 40 kegiatan usaha                   | 101,430,000.00          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | DPMPTSP | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan, pelaksanaan penanaman modal                                                      | 40 kegiatan usaha      | 52,397,000.00                 | DAK Non Fisik   |
| 6  | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                    | DPMPTSP | Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan                                                                                                                       | 80 Persen                           | 84,720,500.00           | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                    | DPMPTSP | Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan                                                                                                                       | 80 Persen              | 84,720,500.00                 |                 |
|    | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                  | DPMPTSP | Terlaksananya pemeliharaan ISO, dan tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan                                                                         | 2 Dok                               | 84,720,500.00           | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                  | DPMPTSP | Terlaksananya pemeliharaan ISO, dan tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan                                                                         | 2 Dok                  | 84,720,500.00                 |                 |
|    | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPMPTSP | Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan | 2 Dok                               | 84,720,500.00           | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPMPTSP | Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan | 2 Dok                  | 84,720,500.00                 |                 |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                        |                                     | <b>4,332,027,800.00</b> | <b>TOTAL PAGU</b>                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                        |                        | <b>#VALUE!</b>                |                 |



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang datanganya dari masyarakat baik itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun stakeholder yang lain hingga saat ini belum terakomodir. Hal ini disebabkan ketersediaan dana saat ini sangat minim.

Adapun usulan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal diharapkan dapat meningkatkan capaian Nilai Realisasi Investasi. Hal ini dapat dilakukan karena pelaksanaan pelayanan publik telah dilakukan secara terus menerus, dan kebutuhan yang dirasakan masih dalam ruang lingkup yang sama.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 2023**  
**Kabupaten Tapanuli Utara**

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara**

| No  | Program/Kegiatan                                                   | Lokasi                      | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Besaran/<br>Volume | Catatan       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| (1) | (2)                                                                | (3)                         | (4)                                                                                                                                | (5)                | (6)           |
| 1   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | DPMPTSP Kab. Tapanuli Utara | <i>jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pelaksanaan penanaman modal</i> | 115,899,900.00     | DAU           |
| 2   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  | DPMPTSP Kab. Tapanuli Utara | <i>Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal</i>                                                  | 190,283,100.00     | DAK Non Fisik |
| 3   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | DPMPTSP Kab. Tapanuli Utara | <i>jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan, pelaksanaan penanaman modal</i>           | 101,430,000.00     | DAK Non Fisik |

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai.

Berdasarkan pengertian diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas SDM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan;
3. Meningkatkan Penerapan Standar Pelayanan yang mudah, murah, pasti, transparan, dan terjangkau;
4. Meningkatkan pengembangan investasi.

Kebijakan tersebut diatas akan diimplementasikan dalam bentuk surat – surat keputusan dan akan dijadikan pedoman:

1. Mengatur mekanisme kegiatan lanjutan.
2. Mengarahkan setiap pejabat dan pelaksana bahwa mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu (dalam hal ini 1 tahun). Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan yaitu **Meningkatnya Nilai Investasi.**



Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara struktur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Nilai Investasi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023**

| No  | Tujuan                       | Sasaran                                                     | Indikator Tujuan/Sasaran                     | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                              |                                                             |                                              | 2023                                     |
| (1) | (2)                          | (3)                                                         | (4)                                          | (7)                                      |
| 1   | Meningkatnya Nilai Investasi | Meningkatkan Nilai Investasi                                | Nilai Investasi                              | 175.000.000.000                          |
|     |                              | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu | 91                                       |
|     |                              |                                                             | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat             | 86,50                                    |

### 3.3. Program dan Kegiatan

#### 1. Program Kerja

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Pemerintah pada OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP guna mencapai tujuan dan sasaran. Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara:

- Memperhatikan kepentingan masing-masing Sekretariat dan Kepala-kepala Bidang
- Memperhatikan program kerja Kabupaten Tapanuli Utara
- Mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini dan masa datang.
- Memperhatikan skala prioritas yang menunjang Visi dan Misi.

**Program kerja yang dimaksud adalah:**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.



3. Program Promosi Penanaman Modal.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan dan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

## **2. Kegiatan**

Rumusan Rencana Program Kerja dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 terlampir dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sesuai dengan program kerja adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Fasilitas Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
  - a. Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
    - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.



- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
  - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota.
  - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota.
3. Program Promosi Penanaman Modal
  - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kota.
    - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.
    - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
  - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
    - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
    - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
    - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah
5. Program Pengendalian Pelaksanaan dan Penanaman Modal.
  - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.



- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- a. Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
    - Pengelolaan, Penyediaan dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berebasis system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.2

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara**

| Kode   |        |         |          |              | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020)         | Rencana Tahun 2023 |                                                                                     |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2024                                                           |                                |
|--------|--------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Urusan | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                        |                                                                                       | Lokasi             | Target Capaian Kinerja                                                              | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja                                                              | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif |
| 2.     | 18.    |         |          |              | URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR    |                                                                                       |                    |                                                                                     |                                |             |                 |                                                                                     |                                |
| 2.     | 18.    | 01.     |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            | Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | DPMPTSP            | 100 Persen                                                                          | 3,325,000,000.00               |             |                 | 100 Persen                                                                          | 3,350,000,000.00               |
| 1.     | 03.    | 01.     | 2.       | 01.          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | Terlaksananya Penyusunan dokumen LAKIP Tahun Sebelumnya                               | DPMPTSP            | 1 Dokumen LAKIP                                                                     | 11,999,800.00                  |             |                 | 1 Dokumen LAKIP                                                                     | 13,999,800.00                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.       | 01.          | 01.                                                                    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | DPMPTSP            | 12 Dokumen                                                                          | 5,000,000.00                   | DAU         | -               | 12 Dokumen                                                                          | 6,000,000.00                   |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.       | 01.          | 06.                                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DPMPTSP            | 2 Laporan                                                                           | 3,499,800.00                   | DAU         | -               | 2 Laporan                                                                           | 3,999,800.00                   |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.       | 01.          | 07.                                                                    | Evaluasi Kinerja Perangkat daerah                                                     | DPMPTSP            | 12 Laporan                                                                          | 3,500,000.00                   | DAU         | -               | 12 Laporan                                                                          | 4,000,000.00                   |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.       | 02.          |                                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | DPMPTSP            | Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan | 2,348,002,792.00               |             |                 | Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan | 2,421,677,352.00               |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.       | 02.          | 01.                                                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | DPMPTSP            | 25 Orang/ Bulan                                                                     | 2,297,272,192.00               | DAU         | -               | 25 Orang/ Bulan                                                                     | 2,367,272,192.00               |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.       | 02.          | 03.                                                                    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | DPMPTSP            | 50 Dokumen                                                                          | 43,730,600.00                  | DAU         | -               | 50 Dokumen                                                                          | 47,405,160.00                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.       | 02.          | 05.                                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | DPMPTSP            | 1 dokumen Laporan Keuangan                                                          | 3,500,000.00                   | DAU         | -               | 1 dokumen Laporan Keuangan                                                          | 3,500,000.00                   |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.       | 02.          | 07.                                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD       | DPMPTSP            | 14 Dokumen                                                                          | 3,500,000.00                   | DAU         | -               | 14 Dokumen                                                                          | 3,500,000.00                   |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.       | 03.          |                                                                        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | DPMPTSP            | -                                                                                   | 3,000,000.00                   |             |                 | 3 Laporan                                                                           | 5,000,000.00                   |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.       | 03.          | 05.                                                                    | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | DPMPTSP            | -                                                                                   | 3,000,000.00                   | DAU         | -               | 3 Laporan                                                                           | 5,000,000.00                   |



| Kode   |        |        |         |          | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020)                                                                                                                                                                                        | Rencana Tahun 2023 |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2024 |                                |
|--------|--------|--------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Urusan | Bidang | Urusan | Program | Kegiatan |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 05.      |                                                                        | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                     |                    |                        |                                |             |                 |                           |                                |
|        |        |        |         |          |                                                                        | <b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                              | DPMPTSP            | -                      | 25,000,000.00                  |             |                 |                           | 45,000,000.00                  |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 05.      | 03.                                                                    | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                    | DPMPTSP            | -                      | 3,000,000.00                   | DAU         | -               | Dokumen                   | 5,000,000.00                   |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 05.      | 09.                                                                    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                        | DPMPTSP            | -                      | 22,000,000.00                  | DAU         | -               | 4 Orang                   | 40,000,000.00                  |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 06.      |                                                                        | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                            |                    |                        |                                |             |                 |                           |                                |
|        |        |        |         |          |                                                                        | <i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu serta Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | DPMPTSP            | 12 bulan               | 310,260,200.00                 |             |                 | 12 Bulan                  | 362,260,200.00                 |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 06.      | 01.                                                                    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                     | DPMPTSP            | 12 Paket               | 9,000,000.00                   | DAU         | -               | 12 Paket                  | 9,000,000.00                   |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 06.      | 02.                                                                    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                         | DPMPTSP            | 12 Paket               | 63,260,200.00                  | DAU         | -               | 12 Paket                  | 63,260,200.00                  |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 06.      | 03.                                                                    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                                    | DPMPTSP            | 12 Paket               | 25,000,000.00                  | DAU         | -               | 12 Paket                  | 25,000,000.00                  |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 06.      | 05.                                                                    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                            | DPMPTSP            | 12 Paket               | 30,000,000.00                  | DAU         | -               | 12 Paket                  | 30,000,000.00                  |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 06.      | 08.                                                                    | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                            | DPMPTSP            | Laporan                | 3,000,000.00                   | DAU         | -               | Laporan                   | 5,000,000.00                   |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 06.      | 09.                                                                    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                 | DPMPTSP            | 12 Laporan             | 180,000,000.00                 | DAU         | -               | 12 Laporan                | 230,000,000.00                 |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 07.      |                                                                        | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                                                                                                                                              |                    |                        |                                |             |                 |                           |                                |
|        |        |        |         |          |                                                                        | <i>Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                                                                                                                                                                                 | DPMPTSP            | 12 Bulan               | 337,674,560.00                 |             |                 | 12 Bulan                  | 210,000,000.00                 |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 07.      | 05.                                                                    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                                                  | DPMPTSP            | 3 Unit                 | 317,674,560.00                 | DAU         | -               | 3 Unit                    | 70,000,000.00                  |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 07.      | 05.                                                                    | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                                      | DPMPTSP            | 3 Unit                 | 10,000,000.00                  | DAU         | -               | 2 Unit                    | 20,000,000.00                  |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 07.      | 06.                                                                    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                | DPMPTSP            | Unit                   | 10,000,000.00                  | DAU         | -               | Unit                      | 20,000,000.00                  |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 07.      | 10.                                                                    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                   | DPMPTSP            | 1 Unit                 | -                              | DAU         | -               | 1 Unit                    | 100,000,000.00                 |



| Kode   |        |        |         |          | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020)                                      | Rencana Tahun 2023                                                                                     |                        |                                |                | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2024 |                                |
|--------|--------|--------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Urusan | Bidang | Urusan | Program | Kegiatan |                                                                        |                                                                                                                    | Lokasi                                                                                                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 08.      |                                                                        | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <i>Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                   | DPMPTSP                | 12 Bulan                       | 162,712,875.00 |                 | 12 Bulan                  | 170,712,875.00                 |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 08.      | 01.                                                                    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | DPMPTSP                | 1 Laporan                      | 2,000,000.00   | DAU             | 1 Laporan                 | 7,000,000.00                   |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 08.      | 02.                                                                    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | DPMPTSP                | 36 Laporan                     | 51,553,675.00  | DAU             | 36 Laporan                | 51,553,675.00                  |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 08.      | 03.                                                                    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | DPMPTSP                | 12 Laporan                     | 109,159,200.00 | DAU             | 12 Laporan                | 112,159,200.00                 |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 09.      |                                                                        | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <i>Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor</i>         | DPMPTSP                | 12 Bulan                       | 126,349,773.00 |                 | 12 Bulan                  | 126,349,773.00                 |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 09.      | 01.                                                                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | DPMPTSP                | 5 Unit                         | 75,717,502.00  | DAU             | 5 Unit                    | 75,717,502.00                  |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 09.      | 06.                                                                    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     | DPMPTSP                | 8 Unit                         | 8,192,910.00   | DAU             | 8 Unit                    | 8,192,910.00                   |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 09.      | 09.                                                                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara                                              | DPMPTSP                | 1 Unit                         | 24,617,495.00  | DAU             | 1 Unit                    | 24,617,495.00                  |
| 2.     | 18.    | 01.    | 2.      | 09.      | 11.                                                                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diperlihara             | DPMPTSP                | 6 Unit                         | 17,821,866.00  | DAU             | 6 Unit                    | 17,821,866.00                  |
| 2.     | 18.    | 02.    |         |          |                                                                        | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                                                  | <b>Peningkatan Jumlah Investor</b>                                                                     | DPMPTSP                | 40 Investor                    | 344,000,000.00 |                 | 45 Investor               | 344,300,000.00                 |
| 2.     | 18.    | 02.    | 2.      | 01.      |                                                                        | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah</b>              | <i>Tersedianya pendampingan dan fasilitasi serta forum dialog pemerintah dengan badan usaha</i>        | DPMPTSP                | 10 Investor                    | 199,000,000.00 |                 | 5 Investor                | 229,000,000.00                 |
| 2.     | 18.    | 02.    | 2.      | 01.      | 01.                                                                    | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | Tersedianya Pendampingan dan fasilitasi serta forum dialog pemerintah dengan badan usaha               | DPMPTSP                | 1 Dok                          | 169,000,000.00 | DAU             | 1 Dok                     | 169,000,000.00                 |
| 2.     | 18.    | 02.    | 2.      | 01.      | 02.                                                                    | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                    | Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha dari yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah | DPMPTSP                | 5 Kegiatan Usaha               | 30,000,000.00  | DAU             | 5 Kegiatan Usaha          | 60,000,000.00                  |
| 2.     | 18.    | 02.    | 2.      | 02.      |                                                                        | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>                                                             | <i>Terlaksananya persiapan penyusunan RUPM dan tersedianya peta potensi dan peluang usaha</i>          | DPMPTSP                | 3 Dokumen                      | 145,000,000.00 |                 | 3 Dokumen                 | 115,300,000.00                 |



| Kode   |               |         |          |              | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020)                                                           | Rencana Tahun 2023                                                                                                                                                                                                          |                        |                                            |                | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2024 |                                            |                |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Urusan | Bidang Urusan | program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                        |                                                                                                                                         | Lokasi                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif             | Sumber Dana    |                 | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif             |                |
| 2.     | 18.           | 02.     | 2.       | 02.          | 01.                                                                    | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Tersusunnya dokumen rencana umum penanaman modal daerah Tapanuli Utara                                                                                                                                                      | DPMPTSP                | 1 Dokumen Perda RUPM                       | 100,000,000.00 | DAU             | -                         | 1 Dokumen Perda RUPM                       | 65,300,000.00  |
| 2.     | 18.           | 02.     | 2.       | 02.          | 02.                                                                    | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                                                                | Tersedia peta potensi dan peluang usaha kabupaten tapanuli utara                                                                                                                                                            | DPMPTSP                | 2 Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha   | 45,000,000.00  | DAU             | -                         | 2 Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha   | 50,000,000.00  |
| 2.     | 18.           | 03.     |          |              |                                                                        | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         | Keikutsertaan pada Pameran Investasi                                                                                                                                                                                        | DPMPTSP                | 5 Event                                    | 53,098,500.00  |                 |                           | 6 Event                                    | 53,098,500.00  |
| 2.     | 18.           | 03.     | 2.       | 01.          |                                                                        | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Tersusunnya Dokumen Strategi Promosi serta keikutsertaan pada kegiatan promosi penanaman modal                                                                                                                              | DPMPTSP                | 1 Dokumen                                  | 53,098,500.00  |                 |                           | 1 Dokumen                                  | 53,098,500.00  |
| 2.     | 18.           | 03.     | 2.       | 01.          | 01.                                                                    | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                                             | Jumlah dokumen strategis promosi penanaman modal                                                                                                                                                                            | DPMPTSP                | 1 Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal | 26,765,500.00  | DAU             | -                         | 1 Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal | 26,765,500.00  |
| 2.     | 18.           | 03.     | 2.       | 01.          | 02.                                                                    | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal                                                                                                                                                                       | DPMPTSP                | 1 Dokumen                                  | 26,333,000.00  | DAU             | -                         | 1 Dokumen                                  | 26,333,000.00  |
| 2.     | 18.           | 04.     |          |              |                                                                        | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu                                                                                                                                                                                | DPMPTSP                | 90 Persen                                  | 117,595,800.00 |                 |                           | 91 Persen                                  | 117,595,800.00 |
| 2.     | 18.           | 04.     | 2.       | 01.          |                                                                        | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah | DPMPTSP                | 650 Dokumen dan 10 pengaduan               | 117,595,800.00 |                 |                           | 650 Dokumen dan 10 pengaduan               | 117,595,800.00 |
| 2.     | 18.           | 04.     | 2.       | 01.          | 01.                                                                    | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik     | Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                                               | DPMPTSP                | 650 Dokumen                                | 75,000,000.00  | DAU             | -                         | 650 Dokumen                                | 75,000,000.00  |
| 2.     | 18.           | 04.     | 2.       | 01.          | 02.                                                                    | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non perizinan penanaman modal                                                               | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal                                                                                    | DPMPTSP                | 20 Kegiatan Usaha                          | 18,636,100.00  | DAU             | -                         | 20 Kegiatan Usaha                          | 18,636,100.00  |
| 2.     | 18.           | 04.     | 2.       | 01.          | 03.                                                                    | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan               | jumlah Orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                                                                                | DPMPTSP                | 10 Pengaduan                               | 13,959,700.00  | DAU             | -                         | 10 Pengaduan                               | 13,959,700.00  |



| Kode   |        |        |         |          | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020)                                                                                    | Rencana Tahun 2023                                                                                                                                                                                               |         |                                        |                                | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2024 |                                        |                                |
|--------|--------|--------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Urusan | Bidang | Urusan | program | Kegiatan |                                                                        |                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                     | Lokasi  | Target Capaian Kinerja                 | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana               | Target Capaian Kinerja                 | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif |
| 2.     | 18.    | 04.    | 2.      | 01.      | 04.                                                                    | Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah                                                                                        | jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah                                                                                 | DPMPTSP | 10 Kegiatan Usaha                      | 10,000,000.00                  | DAU             | -                         | 10 Kegiatan Usaha                      | 10,000,000.00                  |
| 2.     | 18.    | 05.    |         |          |                                                                        | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                 | Persentase Izin yang Dikendalikan                                                                                                                                                                                | DPMPTSP | 75 Persen                              | 407,613,000.00                 |                 |                           | 80 Persen                              | 407,613,000.00                 |
| 2.     | 18.    | 05.    | 2.      | 01.      |                                                                        | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Tersedianya profil hasil pemantauan dan pengawasan, terlaksananya monitoring kepemilikan izin dan bimtek/sosialisasi kemudahan berusaha serta validasi faktual dan berita acara pengawasan terhadap pelaku usaha | DPMPTSP | 256 pelaku usaha dan 14 Kegiatan Usaha | 407,613,000.00                 |                 |                           | 256 pelaku usaha dan 14 Kegiatan Usaha | 407,613,000.00                 |
| 2.     | 18.    | 05.    | 2.      | 01.      | 01.                                                                    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan pelaksanaan penanaman modal                                                                                       | DPMPTSP | 40 Kegiatan Usaha                      | 115,899,900.00                 | DAU             | -                         | 40 Kegiatan Usaha                      | 115,899,900.00                 |
| 2.     | 18.    | 05.    | 2.      | 01.      | 01.                                                                    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal                                                                                                                                       | DPMPTSP | 350 pelaku usaha                       | 190,283,100.00                 | DAK             | -                         | 350 pelaku usaha                       | 190,283,100.00                 |
| 2.     | 18.    | 05.    | 2.      | 01.      | 01.                                                                    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan pelaksanaan penanaman modal                                                                                       | DPMPTSP | 40 kegiatan usaha                      | 101,430,000.00                 | DAK             | -                         | 40 kegiatan usaha                      | 101,430,000.00                 |
| 2.     | 18.    | 06.    |         |          |                                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                    | Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan                                                                                                                                                                 | DPMPTSP | 80 Persen                              | 84,720,500.00                  |                 |                           | 85 Persen                              | 84,720,500.00                  |
| 2.     | 18.    | 06.    | 2.      | 01.      |                                                                        | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Terlaksananya pemeliharaan ISO, survey IKM dan LKPM                                                                                                                                                              | DPMPTSP | 1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM         | 84,720,500.00                  |                 |                           | 1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM         | 84,720,500.00                  |
| 2.     | 18.    | 06.    | 2.      | 01.      | 01.                                                                    | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | tersedianya data pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik                                          | DPMPTSP | 1 Sertifikat                           | 84,720,500.00                  | DAU             | -                         | 1 Sertifikat                           | 84,720,500.00                  |
|        |        |        |         |          |                                                                        | TOTAL PAGU                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                        | 4,332,027,800.00               |                 | -                         |                                        | 4,357,327,800.00               |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Tujuan dan sasaran, serta Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023. Penetapan Nomenklatur Perencanaan Program dan Kegiatan telah mengadopsi Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara**

| Kode   |        |                |          |              |        | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020                | Sasaran Perangkat Daerah                                                                                                                                               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020) | Rencana Tahun 2023                                                         |                                |                                | Prakiraan Maju 2024 |   | Catatan Penting | Penanggung Jawab |
|--------|--------|----------------|----------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------|------------------|
| Urusan | Bidang | Urusan program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Lokasi |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                               | Target Capaian Kinerja                                                     | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana         |   |                 |                  |
| 2      | 18.    |                |          |              |        | URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                   |                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                |                                |                     |   |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.            |          |              |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                               | DPMPPTSP                                                                      | 100 Persen                                                                 | 3,325,000,000.00               | 3,350,000,000.00               |                     |   |                 |                  |
| 1.     | 03.    | 01.            | 2.       | 01.          |        | Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Terlaksananya Penyusunan dokumen LAKIP Tahun Sebelumnya                                                                                                                | DPMPTSP                                                                       | 1 Dokumen LAKIP                                                            | 11,999,800.00                  | 13,999,800.00                  |                     |   |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.            | 2.       | 01.          | 01.    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat                                                                                                                                   | DPMPTSP                                                                       | 2 Dokumen                                                                  | 5,000,000.00                   | 6,000,000.00                   | DAU                 | - | Sekretaris      |                  |
| 2.     | 18.    | 01.            | 2.       | 01.          | 06.    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DPMPTSP                                                                       | 2 Laporan                                                                  | 3,499,800.00                   | 3,999,800.00                   | DAU                 | - |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.            | 2.       | 01.          | 07.    | Evaluasi Kinerja Perangkat daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah                                                                                                                               | DPMPTSP                                                                       | 12 Dokumen                                                                 | 3,500,000.00                   | 4,000,000.00                   | DAU                 |   |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.            | 2.       | 02.          |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD serta Penyusunan Laporan Keuangan Tahun                         | DPMPTSP                                                                       | Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. | 2,348,002,792.00               | 2,421,677,352.00               |                     |   | Sekretaris      |                  |
| 2.     | 18.    | 01.            | 2.       | 02.          | 01.    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | DPMPTSP                                                                       | 25 Orang/ Bulan                                                            | 2,297,272,192.00               | 2,367,272,192.00               | DAU                 | - |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.            | 2.       | 02.          | 03.    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | DPMPTSP                                                                       | 50 Dokumen                                                                 | 43,730,600.00                  | 47,405,160.00                  | DAU                 | - |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.            | 2.       | 02.          | 05.    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                               | DPMPTSP                                                                       | 1 dokumen Laporan Keuangan                                                 | 3,500,000.00                   | 3,500,000.00                   | DAU                 | - |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.            | 2.       | 02.          | 07.    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD                                                                                                           | DPMPTSP                                                                       | 14 Dokumen                                                                 | 3,500,000.00                   | 3,500,000.00                   | DAU                 | - |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.            | 2.       | 03.          |        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                          | DPMPTSP                                                                       | -                                                                          | 3,000,000.00                   | 5,000,000.00                   |                     |   |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.            | 2.       | 03.          | 05.    | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | DPMPTSP                                                                       | -                                                                          | 3,000,000.00                   | 5,000,000.00                   | DAU                 | - | Sekretaris      |                  |
| 2.     | 18.    | 01.            | 2.       | 05.          |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                       | DPMPTSP                                                                       | -                                                                          | 25,000,000.00                  | 45,000,000.00                  |                     |   |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.            | 2.       | 05.          | 03.    | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       | DPMPTSP                                                                       | -                                                                          | 3,000,000.00                   | 5,000,000.00                   | DAU                 | - | Sekretaris      |                  |
| 2.     | 18.    | 01.            | 2.       | 05.          | 09.    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | DPMPTSP                                                                       | -                                                                          | 22,000,000.00                  | 40,000,000.00                  | DAU                 | - |                 |                  |



| Kode   |        |         |         |          | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020 | Sasaran Perangkat Daerah                                                                                           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020)                                                                                                                                                                                 | Rencana Tahun 2023 |                        |                                | Prakiraan Maju 2024            |             | Catatan Penting | Penanggung Jawab |
|--------|--------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Urusan | Bidang | Jurusan | Program | Kegiatan |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 06.      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                                                                                                                    | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu serta Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DPMPTSP            | 12 bulan               | 310,260,200.00                 | 362,260,200.00                 |             |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 06.      | 01.                                                                    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                            | DPMPTSP            | 12 Paket               | 9,000,000.00                   | 9,000,000.00                   | DAU         | -               | Sekretaris       |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 06.      | 02.                                                                    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                                                                                                                                                                                | DPMPTSP            | 12 Paket               | 63,260,200.00                  | 63,260,200.00                  | DAU         | -               |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 06.      | 03.                                                                    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                                                                                                                                                                           | DPMPTSP            | 12 Paket               | 25,000,000.00                  | 25,000,000.00                  | DAU         | -               |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 06.      | 05.                                                                    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan                                                                                                                                                                                                   | DPMPTSP            | 12 Paket               | 30,000,000.00                  | 30,000,000.00                  | DAU         | -               |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 06.      | 08.                                                                    | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang terlaksana                                                                                                                                                                                                               | DPMPTSP            | Laporan                | 3,000,000.00                   | 5,000,000.00                   | DAU         | -               |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 06.      | 09.                                                                    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                           | DPMPTSP            | 12 Laporan             | 180,000,000.00                 | 230,000,000.00                 | DAU         | -               |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 07.      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | DPMPTSP                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 Bulan           | 337,674,560.00         | 210,000,000.00                 |                                |             |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 07.      | 05.                                                                    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan                                                                                                                                                                           | DPMPTSP            | 3 Unit                 | 317,674,560.00                 | 70,000,000.00                  | DAU         | -               | Sekretaris       |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 07.      | 05.                                                                    | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Unit Mebel yang disediakan                                                                                                                                                                                                                             | DPMPTSP            | 3 Unit                 | 10,000,000.00                  | 20,000,000.00                  | DAU         | -               |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 07.      | 06.                                                                    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                                                                                                                                                                       | DPMPTSP            | Unit                   | 10,000,000.00                  | 20,000,000.00                  | DAU         | -               |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 07.      | 10.                                                                    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                          | DPMPTSP            | 1 Unit                 | -                              | 100,000,000.00                 | DAU         | -               |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 08.      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | DPMPTSP                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 Bulan           | 162,712,875.00         | 170,712,875.00                 |                                |             |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 08.      | 01.                                                                    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                 | DPMPTSP            | 1 Laporan              | 2,000,000.00                   | 7,000,000.00                   | DAU         |                 | Sekretaris       |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 08.      | 02.                                                                    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                                                                                                                                                                        | DPMPTSP            | 36 Laporan             | 51,553,675.00                  | 51,553,675.00                  | DAU         | -               |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 08.      | 03.                                                                    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                                                                                                                                                                          | DPMPTSP            | 12 Laporan             | 109,159,200.00                 | 112,159,200.00                 | DAU         | -               |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 09.      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor                            | DPMPTSP                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 Bulan           | 126,349,773.00         | 126,349,773.00                 |                                |             |                 |                  |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.      | 09.      | 01.                                                                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya                                                                                                                                                        | DPMPTSP            | 5 Unit                 | 75,717,502.00                  | 75,717,502.00                  | DAU         | -               |                  |



| Kode   |        |         |          |              |     | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEMEN 050-3708 Tahun 2020                                                                    | Sasaran Perangkat Daerah     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEMEN 050-3708 Tahun 2020)                                                                                                                                                | Rencana Tahun 2023 |                                          |                                | Prakiraan Maju 2024            |             | Catatan Penting | Penanggung Jawab                                              |
|--------|--------|---------|----------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Urusan | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |     |                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                             | Lokasi             | Target Capaian Kinerja                   | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 |                                                               |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.       | 09.          | 06. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                 |                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                                                                                                                                          | DPMPPTSP           | 8 Unit                                   | 8,192,910.00                   | 8,192,910.00                   | DAU         |                 | Sekretaris                                                    |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.       | 09.          | 09. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                             |                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                                                                                                                                   | DPMPPTSP           | 1 Unit                                   | 24,617,495.00                  | 24,617,495.00                  | DAU         | -               |                                                               |
| 2.     | 18.    | 01.     | 2.       | 09.          | 11. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                             |                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                                                                                                   | DPMPPTSP           | 6 Unit                                   | 17,821,866.00                  | 17,821,866.00                  | DAU         | -               |                                                               |
| 2.     | 18.    | 02.     |          |              |     | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                                                                        |                              | <b>Peningkatan Jumlah Investor</b>                                                                                                                                                                                          | DPMPPTSP           | <b>40 Investor</b>                       | <b>344,000,000.00</b>          | <b>344,300,000.00</b>          |             |                 |                                                               |
| 2.     | 18.    | 02.     | 2.       | 01.          |     | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                           |                              | Tersedianya pendampingan dan fasilitas serta forum dialog pemerintah dengan badan usaha                                                                                                                                     | DPMPPTSP           | 10 Investor                              | 199,000,000.00                 | 229,000,000.00                 |             |                 |                                                               |
| 2.     | 18.    | 02.     | 2.       | 01.          | 01. | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                           | Meningkatkan Nilai Investasi | Jumlah Perda dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal                                                                                                                                              | DPMPPTSP           | 10 Investor                              | 169,000,000.00                 | 169,000,000.00                 | DAU         | -               | Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi |
| 2.     | 18.    | 02.     | 2.       | 01.          | 02. | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                          |                              | Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha dari yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah                                                                                                                      | DPMPPTSP           | 12 bulan                                 | 30,000,000.00                  | 60,000,000.00                  | DAU         | -               |                                                               |
| 2.     | 18.    | 02.     | 2.       | 02.          |     | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>                                                                                   |                              | Terlaksananya persiapan penyusunan RUPM dan tersedianya peta potensi dan peluang usaha                                                                                                                                      | DPMPPTSP           | 3 Dokumen                                | 145,000,000.00                 | 115,300,000.00                 |             |                 | Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi |
| 2.     | 18.    | 02.     | 2.       | 02.          | 01. | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |                              | Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Tapanuli Utara                                                                                                                                                             | DPMPPTSP           | 1 Dokumen Perda RUPM                     | 100,000,000.00                 | 65,300,000.00                  | DAU         | -               |                                                               |
| 2.     | 18.    | 02.     | 2.       | 02.          | 02. | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                                                                 |                              | Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten tapanuli utara                                                                                                                                                              | DPMPPTSP           | 2 Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha | 45,000,000.00                  | 50,000,000.00                  | DAU         | -               |                                                               |
| 2.     | 18.    | 03.     |          |              |     | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                   |                              | <b>Keikutsertaan pada Pameran Investasi</b>                                                                                                                                                                                 | DPMPPTSP           | <b>6 Event</b>                           | <b>53,098,500.00</b>           | <b>53,098,500.00</b>           |             |                 | Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi |
| 2.     | 18.    | 03.     | 2.       | 01.          |     | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                    |                              | Tersusunnya Dokumen Strategi Promosi serta keikutsertaan pada kegiatan promosi penanaman modal                                                                                                                              | DPMPPTSP           | 1 Dokumen                                | 53,098,500.00                  | 53,098,500.00                  |             |                 |                                                               |
| 2.     | 18.    | 03.     | 2.       | 01.          | 01. | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                                              |                              | Jumlah dokumen strategis promosi penanaman modal                                                                                                                                                                            | DPMPPTSP           | 1 Dokumen Strategi Promosi               | 26,765,500.00                  | 26,765,500.00                  | DAU         | -               |                                                               |
| 2.     | 18.    | 03.     | 2.       | 01.          | 02. | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                       |                              | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal                                                                                                                                                                       | DPMPPTSP           | 1 Dokumen                                | 26,333,000.00                  | 26,333,000.00                  | DAU         | -               |                                                               |
| 2.     | 18.    | 04.     |          |              |     | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                 |                              | <b>Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu</b>                                                                                                                                                                         | DPMPPTSP           | <b>91 Persen</b>                         | <b>117,595,800.00</b>          | <b>117,595,800.00</b>          |             |                 |                                                               |
| 2.     | 18.    | 04.     | 2.       | 01.          |     | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                              | Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah | DPMPPTSP           | 650 Dokumen dan 10 pengaduan             | 117,595,800.00                 | 117,595,800.00                 |             |                 |                                                               |
| 2.     | 18.    | 04.     | 2.       | 01.          | 01. | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik      |                              | Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                                               | DPMPPTSP           | 650 Dokumen                              | 75,000,000.00                  | 75,000,000.00                  | DAU         |                 |                                                               |



| Kode              |        |        |         |          |              | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020                                                                                           | Sasaran Perangkat Daerah                                    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020)                                                                                                                                           | Rencana Tahun 2023 |                                                         |                                | Prakiraan Maju 2024            |               | Catatan Penting | Penanggung Jawab                                              |
|-------------------|--------|--------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Urusan            | Bidang | Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi             | Target Capaian Kinerja                                  | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 |                                                               |
| 2.                | 18.    | 04.    | 2.      | 01.      | 02.          | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non perizinan penanaman modal                                                                                        | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal                                                                                | DPMPPTSP           | 20 Kegiatan Usaha                                       | 18,636,100.00                  | 18,636,100.00                  | DAU           |                 | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan                             |
| 2.                | 18.    | 04.    | 2.      | 01.      | 03.          | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                                        |                                                             | Jumlah Orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                                                                            | DPMPPTSP           | 10 Pengaduan                                            | 13,959,700.00                  | 13,959,700.00                  | DAU           |                 |                                                               |
| 2.                | 18.    | 04.    | 2.      | 01.      | 04.          | Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah                                                                                        |                                                             | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah                                                                                        | DPMPPTSP           | 10 Kegiatan Usaha                                       | 10,000,000.00                  | 10,000,000.00                  | DAU           |                 |                                                               |
| 2.                | 18.    | 05.    |         |          |              | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                          |                                                             | <b>Persentase Izin yang Dikendalikan</b>                                                                                                                                                                                | DPMPPTSP           | <b>70 Persen</b>                                        | <b>407,613,000.00</b>          | <b>407,613,000.00</b>          |               |                 |                                                               |
| 2.                | 18.    | 05.    | 2.      | 01.      |              | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                    |                                                             | <i>Tersedianya profil hasil pemantauan dan pengawasan, terlaksananya monitoring kepemilikan izin dan bimtek/sosialisasi kemudahan berusaha serta validasi faktual dan berita acara pengawasan terhadap pelaku usaha</i> | DPMPPTSP           | <i>350 pelaku usaha, 70 pemilik bangunan dan 80 BAP</i> | <b>407,613,000.00</b>          | <b>407,613,000.00</b>          |               |                 |                                                               |
| 2.                | 18.    | 05.    | 2.      | 01.      | 01.          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | Meningkatkan Nilai Investasi                                | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan pelaksanaan penanaman modal                                                                                              | DPMPPTSP           | 40 Kegiatan Usaha                                       | 115,899,900.00                 | 115,899,900.00                 | DAU           |                 | Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi |
| 2.                | 18.    | 05.    | 2.      | 01.      | 01.          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                |                                                             | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal                                                                                                                                              | DPMPPTSP           | 350 pelaku usaha                                        | 190,283,100.00                 | 190,283,100.00                 | DAK Non Fisik |                 |                                                               |
| 2.                | 18.    | 05.    | 2.      | 01.      | 01.          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               |                                                             | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan pelaksanaan penanaman modal                                                                                              | DPMPPTSP           | 40 kegiatan usaha                                       | 101,430,000.00                 | 101,430,000.00                 | DAK Non Fisik |                 |                                                               |
| 2.                | 18.    | 06.    |         |          |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>                                                                                             |                                                             | <b>Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan</b>                                                                                                                                                                 | DPMPPTSP           | <b>78 Persen</b>                                        | <b>84,720,500.00</b>           | <b>84,720,500.00</b>           |               |                 |                                                               |
| 2.                | 18.    | 06.    | 2.      | 01.      |              | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                           |                                                             | <i>Terlaksananya pemeliharaan ISO, survey IKM dan LKPM</i>                                                                                                                                                              | DPMPPTSP           | <i>1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM</i>                   | <b>84,720,500.00</b>           | <b>84,720,500.00</b>           |               |                 |                                                               |
| 2.                | 18.    | 06.    | 2.      | 01.      | 01.          | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan                                                  | DPMPPTSP           | 1 Sertifikat                                            | 84,720,500.00                  | 84,720,500.00                  | DAU           |                 | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan                             |
| <b>TOTAL PAGU</b> |        |        |         |          |              |                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                         | <b>4,332,027,800.00</b>        | <b>4,357,327,800.00</b>        |               |                 |                                                               |



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 disusun untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**JONNER JULIFER, ST**  
**PEMBINA**

**NIP. 19700718 200502 1 001**



**LAMPIRAN**  
**RENCANA KERJA**  
**(RENJA)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jln. D. I. Panjaitan Tarutung 22411  
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108, website: eperizinan@taputkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR: 25 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022, sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 03)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas untuk:

- a. Melakukan persiapan dalam mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan, melakukan pengendalian dan penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah meliputi Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023;
- b. Menyusun Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024;
- c. Menyusun Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024;
- d. Menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung

Pada tanggal : 15-08-2022



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**JONNER JULIFER, ST  
PEMBINA**

**NIP. 19700718 200502 1 001**

Tembusan Yth:

1. Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Utara;
2. Peninggal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR : 25 TAHUN 2022  
TANGGAL : 15 Agustus 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023**

- I. Ketua Tim : Jonner Julifer, ST/Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- II. Sekretaris Tim : Ir. Lince Rita Talebong/Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- III. Pelaksana Administrasi :
  - 1. Susi Radotma Hutaauruk, SE. MM/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
  - 2. Rungguk Pardede, SH/Analisis Keuangan
  - 3. Siska Mariana Simanjuntak, SE/Analisis Rencana Program dan Kegiatan
- IV. Kelompok Kerja
  - A. Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi
    - Koordinator : Ronny M.B. Hutasoit, SE/Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi
    - Anggota :
      - 1. Halomoan Batubara, ST., M.Si/Perencana
      - 2. Christian Hutagalung, SP/Perencana
      - 3. Marlon Peron V. Sianipar, SE/Perancang Peraturan Perundang-undangan
      - 4. Marolop Sirait, ST/Analisis Pengembangan Potensi Daerah
      - 5. Desi Susanti Lumban Gaol, SE/Analisis Penanaman Modal
  - B. Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Informasi dan Pelaporan
    - Koordinator : Erwin Hasudungan Hutaauruk, SP. M.Si/Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Informasi dan Pelaporan
    - Anggota :
      - 1. Toni Rianto Sitorus, ST/Asesor Manajemen Mutu Industri
      - 2. Evita Bernadeta Ginting, ST/Arsiparis
      - 3. Albert Silitonga, SH/Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
      - 4. Kristina Sitompul, A.Md/Pengelola Data Pengembangan Investasi

C. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Koordinator : Hotmauli Parhusip, SE., MM/Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Anggota : 1. Juherman Amubi Purba, SE/Analisis Kebijakan  
2. Tulus Pinta Raja Situmeang, ST/Analisis Kebijakan  
3. Tiarna Panggabean/Analisis Kebijakan  
4. Marulam Silaban, ST/Analisis Dokumen Perizinan  
5. Ruth Sabrina Matondang, SH/Analisis Dokumen Perizinan  
6. Susenti Lasmaria Sitorus, A.Md/Pengelola Dokumen Perizinan



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**JONNER JULIFER, ST  
PEMBINA**

**NIP. 197007182005021001**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. D. I. Panjaitan Tarutung 22411  
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633) 20108

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**NOMOR: 29 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang – undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023**

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023;

KEDUA : Renja Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022
- c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- e. Bab V : Penutup

- KETIGA : Renja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi Pedoman dalam:
- a. Pelaksanaan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan bagi seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode 2023;
  - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung  
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**JONNER JULIFER, ST**  
**PEMBINA**  
**NIP. 197007182005021001**

Tembusan Yth:

1. Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Utara;
2. Peninggal.